

## IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KELURAHAN ANTAPANI KULON KECAMATAN ANTAPANI KOTA BANDUNG

**Muhammad Khoir Fadlillah<sup>1)\*</sup>**  
*Universitas Al Ghifari Bandung, Indonesia<sup>1)</sup>*  
*Email: mkhoir.f@gmail.com<sup>\*</sup>*

### Riwayat Artikel

Diterima: 17 Mei 2025

Disetujui: 18 Juni 2025

Diterbitkan: 2 Juli 2025

### Abstract

*This research explores the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Antapani Kulon Sub-district, Bandung City, and its role in improving social welfare. Using a descriptive qualitative approach with observation, interviews, documentation, and literature study, the study involved four informants and applied triangulation for data validation. Based on Jones' theory—organization, interpretation, and implementation—the study found that while the PKH mechanism runs according to plan, coordination among stakeholders remains suboptimal. One key obstacle is limited understanding of the graduation system, though facilitators continue to educate beneficiaries. Despite challenges, PKH has positively impacted Beneficiary Families (KPM), particularly in supporting children's education and basic needs. Overall, the program in Antapani Kulon is considered well-implemented, meeting Jones' three pillars, as reflected by the community's positive response and ongoing efforts to address implementation issues.*

**Keywords:** Welfare Program, Theory, Mechanism, Implementation

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Antapani Kulon, Kota Bandung, dan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka terhadap empat informan, serta analisis data menggunakan triangulasi. Berdasarkan teori Jones—organisasi, interpretasi, dan implementasi—ditemukan bahwa mekanisme PKH telah berjalan sesuai rencana, meskipun koordinasi antar pihak terkait masih kurang optimal. Salah satu kendala utama adalah pemahaman yang terbatas mengenai sistem graduasi, namun para pendamping terus memberikan edukasi. Meski menghadapi tantangan, program ini memberikan dampak positif bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), terutama dalam mendukung pendidikan anak dan kebutuhan dasar. Secara keseluruhan, pelaksanaan PKH di Antapani Kulon dinilai cukup baik, memenuhi tiga pilar teori Jones, dengan respons positif dari masyarakat dan upaya perbaikan yang terus dilakukan.

**Kata Kunci:** Program Kesejahteraan, Teori, Mekanisme, Pelaksanaan

### A. PENDAHULUAN

Peningkatan kesejahteraan sosial merupakan salah satu tujuan utama yang ingin dicapai oleh banyak negara. Salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut adalah masalah kemiskinan, yang hingga kini masih menjadi persoalan global, termasuk di Indonesia. Untuk mengurangi kemiskinan, berbagai negara telah menerapkan beragam

strategi dan pendekatan yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Namun demikian, kemiskinan tetap belum bisa diberantas sepenuhnya. Realitanya, fenomena ini masih ditemukan di berbagai penjuru dunia, bahkan di negara-negara maju sekalipun. Tak dapat dipungkiri, kemiskinan merupakan persoalan kompleks dan mendalam yang membutuhkan inovasi kebijakan dari pemerintah agar dapat ditangani secara efektif.

Kemiskinan merupakan persoalan yang sering kita jumpai dan sering kali menjadi ancaman serius serta bencana sosial bagi suatu negara. Kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi kehidupan dengan standar yang rendah, di mana sekelompok individu mengalami kekurangan secara materi jika dibandingkan dengan standar hidup rata-rata yang berlaku di masyarakat. Kehidupan dengan standar rendah ini berdampak langsung pada berbagai aspek, seperti kesehatan, moralitas, hingga harga diri individu yang tergolong miskin. Permasalahan kemiskinan ini merupakan tantangan global yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama negara-negara berkembang seperti Indonesia (Suparlan, 1984). Faktor kemiskinan ini masih sulit untuk diatasi oleh pemerintah Indonesia berbagai upaya telah dilakukan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengatasi faktor kemiskinan, dengan berbagai upaya yang telah diwujudkan melalui kebijakan dan program-program pemerintah, namun upaya tersebut masih belum bisa mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi pada masyarakat di Indonesia, hal ini bisa kita lihat dengan masih tingginya angka kemiskinan yang ada di Indonesia dengan Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, menurun 0,46 juta orang dari September 2022 dan menurun 0,26 juta orang dari Maret 2022, baik itu masyarakat di perkotaan ataupun di perdesaan, walaupun angka tersebut menurun dari tahun sebelumnya tetap saja angka kemiskinan yang ada di Indonesia ini tergolong masih tetap tinggi.

Salah satunya pada kasus kemiskinan yang terjadi di Kota Bandung. Kota Bandung merupakan salah satu kota metropolitan yang ada di wilayah Jawa Barat dengan jumlah penduduk 2,4 juta. Saat ini kota Bandung yang memiliki 30 Kecamatan dengan jumlah 151 kelurahan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Maret Tahun 2023 bahwa angka kemiskinan berdasarkan jumlah penduduknya telah mencapai 102,80 ribu orang atau berada pada angka 3,96 persen. Artinya telah mengalami penurunan angka kemiskinan sebanyak 7,02 ribu orang apabila dilihat dan dibandingkan dengan angka penduduk miskin bulan Maret Tahun 2022 yang berjumlah 109,82 ribu orang atau berada pada angka 4,25 persen.

Kecamatan Antapani yang merupakan satu dari 30 kecamatan yang ada di kota Bandung memiliki empat Kelurahan yang dimana tidak menutup kemungkinan adanya kemiskinan di wilayah tersebut. Kelurahan Antapani Kulon yang merupakan salah satu dari beberapa kelurahan di Kota Bandung yang mengalami permasalahan kemiskinan. Kelurahan Antapani Kulon memiliki penduduk sebanyak 8.630 jiwa, memiliki wilayah lebih kecil dibandingkan 3 kelurahan lainnya. Memiliki luas daerah 0,95 km<sup>2</sup> dalam persentasenya 22,57% dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2022. Kelurahan Antapani Kulon ini termasuk wilayah yang cukup padat penduduk yang dimana sebagian merupakan penduduk yang datang merantau dan bekerja di Kota Bandung untuk menggantungkan hidupnya. Banyaknya asumsi bahwa hidup di kota akan mengubah perekonomian mereka namun kenyataannya penghasilan tidak sebanding dengan biaya hidup yang cukup. Ini merupakan salah satu faktor dari meningkatnya angka kemiskinan yang cukup umum termasuk di kota besar. wilayah ini telah mendapatkan berbagai program yang telah dijalankan pemerintah terutama untuk membantu mengupayakan penurunan kemiskinan dengan memberi bantuan kepada masyarakat miskin atau tidak mampu.

Salah satu program yang telah di wujudkan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan ini adalah dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH). Yaitu program bantuan sosial yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementrian Sosial RI dengan memberikan

bantuan sosial secara tunai maupun non tunai kepada keluarga miskin yang memenuhi kriteria disebut dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan rentan secara teratur dan bertahap. Program ini memiliki tujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan secara berkala juga untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dengan harap bisa merata di seluruh Indonesia. Program ini telah diawasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas). Program Keluarga Harapan (PKH) ini sudah dimulai sejak Tahun 2007 sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang jaminan sosial dan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan.

Program ini ada dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Keluarga Harapan (Permensos 1/2018). Dengan berbagai landasan hukum termasuk peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial tentang sistem jaminan sosial nasional, tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengatasi kemiskinan. namun, sejauh ini program tersebut masih belum mampu mengatasi masalah tersebut, Karena angka kemiskinan masih tinggi dan tingkat kesejahteraan sosial masih rendah walaupun sedikitnya sudah meningkat kearah yang lebih baik.

Salah satu tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia kepada masyarakat miskin. di dalam Program Keluarga Harapan (PKH) terdapat tujuan khusus yang dapat berguna untuk mensejahterakan masyarakat dan merubah pola pikir masyarakat menjadi lebih maju sehingga mengedepankan pentingnya pendidikan untuk anak-anaknya sehingga mereka mampu mengarahkan anak-anaknya untuk terus belajar demi masa depan yang cerah dan tidak seperti yang di alami oleh orang tuanya terdahulu (Rahayu, 2013). Sejak di implementasikan Program Keluarga Harapan (PKH) ini sudah mulai mengalami perkembangan dengan banyaknya inovasi, kebijakan terkait Program Keluarga Harapan (PKH) ini sekarang bukan hanya sekedar memastikan bahwa bantuan bisa tepat sasaran dan membantu penyaluran bantuan bisa berjalan dengan baik. Utamanya adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan dengan menghasilkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) sampai bisa ke tahap graduasi, bukan hanya karena tidak memenuhi syarat kepesertaan, namun Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) juga bisa berdaya dan mandiri.

Ketertarikan saya mengambil judul ini karena Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah Kelurahan Antapani Kulon ini masih kurang maksimal dan masih banyaknya hambatan yang terjadi di lapangan seperti, kordinasi antar pihak yang terkait kurang maksimal, kurangnya teknis serta pemantauan dari Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di kelurahan itu biasanya salah satu penghambat yang sering terjadi.

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

Program di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan. Jones dalam (Arif, 2009) menyebutkan program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Menurut Charles O. Jones dalam (Siti Erna Latifi, 2009) ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu:

### **Pengorganisasian**

Struktur organisasi yang jelas sangat diperlukan agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif dan terarah. Dalam konteks ini, pengorganisasian mencakup pembentukan unit pelaksana, pembagian peran, serta penempatan sumber daya manusia sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya. Tenaga pelaksana harus berasal dari SDM yang tidak hanya memahami tugasnya secara administratif, tetapi juga memiliki pemahaman substantif terhadap tujuan

program. Dengan struktur organisasi yang tertata, koordinasi antarunit menjadi lebih mudah, alur pelaporan menjadi jelas, serta tanggung jawab masing-masing pelaksana dapat diidentifikasi secara akuntabel. Hal ini juga memungkinkan proses implementasi berlangsung lebih efisien dan minim konflik, karena adanya kejelasan dalam rantai komando serta prosedur operasional yang terstandar. Oleh karena itu, pengorganisasian yang matang menjadi fondasi utama dalam memastikan program dapat diimplementasikan secara optimal sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

### **Interpretasi Para pelaksana**

Merupakan salah satu aspek penting dalam keberhasilan pelaksanaan suatu program. Interpretasi di sini merujuk pada bagaimana para pelaksana memahami, menafsirkan, dan menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata di lapangan. Pelaksana program dituntut untuk mampu menjalankan kegiatan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan, seperti petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksana (juklak), agar implementasi berjalan sesuai dengan tujuan awal kebijakan. Ketepatan dalam memahami isi juknis dan juklak sangat memengaruhi konsistensi pelaksanaan program, sebab penafsiran yang keliru dapat menyebabkan penyimpangan, kesalahan prosedur, atau bahkan kegagalan pencapaian hasil. Oleh karena itu, penting bagi pelaksana memiliki kemampuan analitis, ketelitian, serta pemahaman menyeluruh terhadap regulasi dan prosedur yang berlaku. Dengan interpretasi yang tepat, pelaksana akan dapat menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal tanpa menyimpang dari substansi kebijakan, serta mampu memberikan solusi terhadap kendala yang muncul selama implementasi. Hal ini akan berdampak langsung pada efektivitas program dan pencapaian kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir kebijakan.

### **Penerapan atau Aplikasi**

Aspek penerapan atau aplikasi merujuk pada tahap pelaksanaan nyata dari sebuah kebijakan atau program di lapangan. Tahapan ini menekankan pentingnya tindakan konkret yang dilakukan oleh para pelaksana sesuai dengan arahan dan tujuan kebijakan. Untuk memastikan penerapan berjalan efektif, diperlukan adanya prosedur kerja yang jelas dan terstruktur, yang mencakup jadwal kegiatan, pembagian tugas, serta alur pelaksanaan yang sistematis. Prosedur ini berfungsi sebagai pedoman teknis yang mengatur pelaksanaan program agar berjalan sesuai dengan rencana dan tidak tumpang tindih dengan program atau kegiatan lain yang berlangsung dalam waktu yang sama. Tanpa prosedur yang terstandar, pelaksanaan program berisiko mengalami keterlambatan, ketidakefisienan, bahkan konflik pelaksanaan antarkegiatan. Oleh karena itu, perumusan prosedur kerja yang tepat menjadi bagian penting dari penerapan kebijakan yang efektif, karena tidak hanya membantu menjaga ketertiban pelaksanaan, tetapi juga memastikan bahwa setiap tahapan program dijalankan secara tepat waktu dan sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Dengan penerapan yang tertib dan terukur, tujuan program dapat tercapai secara optimal dan dampaknya terhadap masyarakat akan lebih nyata.

## **C. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif, yaitu melalui pendekatan agar mengetahui peristiwa yang dirasakan subjek dari penelitian berupa perbuatan, tindakan, motivasi dan lain-lain. Menggunakan metode kualitatif akan lebih focus analisa tentang fenomena yang diamati dengan cara argumentatif (Moleong, 2007). Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memperoleh pemecahan terhadap berbagai masalah penelitian. Permasalahan yang dikaji oleh peneliti merupakan masalah yang bersifat sosial dan dinamis. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu proses pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan atau

melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. (HS, 2021)

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Keberhasilan suatu Implementasi program dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti yang dijelaskan menurut Menurut Charles O. Jones dalam (Siti Erna Latifi, 2009) ada 3 pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu: pengorganisasian struktur organisasi, interpretasi para pelaksana dan juga penerapan atau aplikasi yang sesuai dengan prosedur. Adapun penjelasan terkait 3 pilar faktor berjalanya Implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Antapani Kulon ini sebagai berikut:

##### **Pengorganisasian**

Faktor utama dalam berjalanya implementasi suatu program menurut teori yang digunakan oleh penulis yaitu pengorganisasian merupakan faktor pertama yang paling penting karena tujuan dari pengorganisasian ini sangat menentukan jalan atau tidaknya suatu program. Pengorganisasian sangat penting dalam implementasi program karena membantu menyusun tugas, tanggung jawab, dan sumber daya secara efektif. Hal ini memastikan koordinasi yang baik, meminimalkan redundansi, dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan program. Organisasi yang baik juga mempermudah komunikasi antar anggota tim, memfasilitasi pemecahan masalah, dan meningkatkan akuntabilitas dengan struktur yang jelas, implementasi program dapat dilakukan secara lebih terarah dan sukses.

Artinya keberhasilan suatu program dapat dilihat dari berjalan atau tidaknya struktur organisasi di dalamnya, adapun tugas dan fungsi terkait pedoman organisasi ini sudah diatur oleh Kementerian Sosial sehingga memberikan kejelasan bagi pihak yang terlibat, hubungan antar organisasi juga perlu diperhatikan yang dimana disitu mencakup bahwa bagaimana interaksi antara pelaksana kebijakan dengan organisasi lain yang ikut berpartisipasi di dalamnya dengan masyarakat penerima bantuan. Agar tercapai hubungan yang lancar maka diperlukan komunikasi yang baik pula demi menunjang tersampainya informasi ataupun jalinan yang tidak akan menyebabkan permasalahan sehingga mengganggu jalannya proses implementasi suatu program atau kebijakan.

Untuk itu perlu adanya koordinasi yang baik dengan pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) adapun instansi yang bekerja sama dengan PKH yaitu Kementerian Sosial, Dinas Sosial, pihak Kelurahan, Bank, Kantor Pos, dan Sekolah. Semua organisasi tersebut saling berkoordinasi satu sama lain sehingga Program Keluarga Harapan (PKH) dapat berjalan, dalam proses pelaksanaan pendampingan KPM.

Bentuk koordinasi dari pendamping PKH di Kelurahan Antapani Kulon sendiri sudah terbilang cukup baik antara pihak terkait dan bentuk kerjasama antara pendamping dengan pihak yang menjadi fasilitator selalu dikomunikasikan secara terbuka, sehingga dari bentuk koordinasi ini bisa dirasakan oleh KPM itu sendiri, yang dimana KPM sendiri menjadi lebih memahami segala prosesnya. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti dengan pendamping PKH Kelurahan Antapani Kulon sehingga hasil dari koordinasi dan komunikasi antar organisasi yang berkaitan ini dapat menghasilkan kejelasan informasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pengorganisasian dan komunikasi yang jelas sangatlah memberikan dampak yang baik terhadap KPM sendiri dari hasil wawancara pun terlihat jelas bahwa faktor ini dapat memberikan keberhasilan jika dijalankan dengan baik, dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bersama pendamping dan salah satu KPM bisa disimpulkan bahwa faktor tersebut sudah bisa dikatakan berjalan dengan cukup baik.

##### **Interpretasi Para Pelaksana**

Interpretasi (Interpretation) merupakan aktivitas penterjemahan, penafsiran, Penjelasan substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami,

sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan serta layak dilaksanakan. Interpretasi atas implementasi program juga sangatlah penting yang dimana dalam proses pelaksanaan program apalagi program tersebut berhubungan dengan masyarakat langsung.

Karena pada dasarnya tidak semua masyarakat dapat langsung mengerti terkait bagaimana pelaksanaan dari program tersebut, apalagi Program Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki banyak mekanisme dalam proses pelaksanaannya, tidak menutup kemungkinan jika interpretasi pendamping dari pelaksana program ini tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik maka akan terjadi kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat, seperti halnya terkait salah satu mekanisme pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu tentang sistem graduasi.

Sistem Graduasi ini sendiri memiliki makna bahwa tidak lagi terpenuhinya kriteria kepesertaan atau meningkatnya suatu kondisi sosial ekonomi, yang dibuktikan melalui kegiatan pemutakhiran data. Dengan kata lain, jika Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah tidak lagi memiliki kriteria untuk diberikan bantuan, atau bahkan status sosial ekonominya sudah meningkat sesuai standar yang telah ditetapkan, keluarga tersebut pastinya akan mengalami Graduasi atau kelulusan dari Program Keluarga Harapan (PKH), artinya keluarga yang sudah dikatakan lulus dari program ini sudah tidak akan mendapatkan bantuan apapun dari Program Keluarga Harapan (PKH).

Jika masyarakat tidak mengerti terkait hal ini maka akan timbul polemik atau permasalahan yang berdampak terhadap program ini salah satunya, masyarakat akan menganggap bahwa program ini tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, sementara kebanyakan KPM yang ada di wilayah Antapani Kulon ini sangat bergantung terhadap Program Keluarga Harapan (PKH), yang dimana justru program ini bukan untuk membiayai KPM secara terus menerus. Dari hasil wawancara dengan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Antapani Kulon, beliau menjelaskan bahwa sistem graduasi dalam PKH terbagi menjadi dua jenis, yaitu graduasi alamiah dan graduasi karena pemutakhiran data sosial ekonomi. Graduasi alamiah terjadi ketika Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah tidak lagi memenuhi kriteria kepesertaan, misalnya karena anak-anak sudah tidak lagi bersekolah atau komponen penerima bantuan telah berubah. Sementara itu, graduasi berdasarkan hasil pemutakhiran sosial ekonomi dilakukan melalui evaluasi kondisi ekonomi terkini keluarga penerima manfaat, sehingga apabila kondisi mereka dinilai sudah membaik dan tidak lagi masuk dalam kategori miskin atau rentan, maka kepesertaan mereka dalam program akan dihentikan. Beliau juga menyampaikan bahwa dalam praktiknya, ia secara aktif melakukan pemilahan terhadap KPM yang telah mengikuti program selama lebih dari lima tahun, kemudian mengumpulkan data dan melakukan koordinasi dengan pihak kesejahteraan sosial (Kesos) untuk menilai kelayakan graduasi berdasarkan peningkatan kesejahteraan keluarga tersebut. Selain itu, ia juga secara rutin melakukan sosialisasi kepada KPM terkait mekanisme graduasi agar mereka dapat lebih memahami bahwa bantuan ini bersifat sementara dan agar mereka tidak terus-menerus bergantung pada program PKH.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu anggota Keluarga Penerima Manfaat (KPM), beliau sudah memahami mekanisme sistem graduasi dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Menurut beliau, sistem graduasi memiliki dampak positif karena dapat memberikan kesempatan kepada keluarga lain yang belum pernah menerima bantuan untuk merasakan manfaat dari program ini, khususnya bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Namun, salah satu KPM juga menyoroti adanya potensi dampak negatif, yaitu ketika KPM yang masih membutuhkan bantuan justru tergraduasi padahal kondisi ekonominya belum sepenuhnya stabil. Meski demikian, beliau menyadari bahwa bila KPM yang telah mengalami peningkatan ekonomi digraduasi, hal tersebut merupakan langkah yang baik agar program dapat menjangkau masyarakat lain secara lebih merata.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa interpretasi pelaksana program sangat berpengaruh terhadap pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Masyarakat, khususnya KPM, menjadi pihak yang menilai secara langsung keberhasilan implementasi program. Oleh karena itu, komunikasi dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat menjadi aspek penting yang tidak dapat dipisahkan dari proses implementasi PKH secara keseluruhan.

### **Penerapan Atau Aplikasi**

Dalam proses implementasi program agar program tersebut bisa berjalan dengan baik maka perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya. Karena penerapan dan aplikasi merupakan langkah yang krusial dalam mewujudkan visi dan tujuan dari suatu program, pada dasarnya jika suatu program tidak di aplikasikan dengan baik maka program tersebut akan mengakibatkan kekecewaan apalagi program tersebut berhubungan dengan kesejahteraan Masyarakat yaitu Program Keluarga Harapan (PKH).

Pelaksanaan atau aplikasi dalam implementasi program sangatlah penting karena dari situ kita dapat mengukur bagaimana kemajuan dan sejauh mana program tersebut mencapai tujuan, selain itu pelaksanaan sangat membantu dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dengan menerapkan program organisasi dapat memastikan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan dari program tersebut.

Jika penerapan dan aplikasi dapat sesuai dengan mekanisme Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah dibuat maka akan memberikan dampak yang baik terhadap berjalanya Program Keluarga Harapan (PKH) di Antapani Kulon ini, pelaksana penerapan dan aplikasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Antapani Kulon ini adalah Pendamping PKH yang berhubungan langsung dengan KPM penerima manfaat dari program ini sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping PKH Kelurahan Antapani Kulon, diketahui bahwa penerapan dan aplikasi Program Keluarga Harapan (PKH) telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Proses penerapan ini dimulai dari tahap perencanaan, penetapan calon KPM, pertemuan awal dan validasi, penetapan resmi KPM, hingga proses pendampingan saat penyaluran bantuan berlangsung. Salah satu bentuk penerapan yang dinilai efektif adalah kegiatan pertemuan rutin yang disebut *Family Development Sessions* (FDS), yaitu forum pembinaan bagi KPM yang membahas berbagai modul, seperti kesehatan, kebersihan, serta penguatan komitmen sosial. Melalui FDS, para pendamping dapat memantau langsung keseriusan dan komitmen KPM terhadap program.

Hal ini juga didukung oleh pandangan dari KPM sendiri, yang menyatakan bahwa pertemuan FDS memberikan manfaat nyata, baik dalam hal peningkatan pengetahuan maupun dalam membentuk kebiasaan hidup bersih dan sehat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan dan aplikasi PKH di Kelurahan Antapani Kulon telah berjalan cukup baik dan memberikan dampak positif bagi para penerima manfaat. Implementasi program tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan, tetapi juga menyentuh aspek pemberdayaan melalui edukasi dan pembinaan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, ditemukan sejumlah kendala yang mempengaruhi implementasi program di lapangan. Meskipun secara umum program telah berjalan sesuai dengan pedoman dan memberikan dampak positif, namun pelaksanaannya tidak lepas dari berbagai hambatan teknis dan non-teknis. Beberapa kendala utama yang dihadapi antara lain adalah :

- 1) Salah satunya yaitu saldo 0 secara tiba-tiba padahal dari data bayar pusat, saldo sudah masuk kedalam rekening KPM.
- 2) Adapula beberapa KPM yang masih kurang memahami bahwa mekanisme bantuan PKH ini tidak selamanya atau akan berhenti otomatis. Maka dari itu, banyak dari KPM

sendiri yang tidak menerima misalkan bantuan tersebut tiba-tiba terhenti dan melaporkan pendamping ke pusat.

Adapun upaya untuk mengatasi kendala tersebut langkah yang sudah dilakukan oleh pendamping PKH Antapani Kulon, yaitu sebagai berikut;

- 1) Upayanya yaitu berkoordinasi langsung dengan pihak Bank bersama KPM karena hal tersebut mungkin saja terjadi dengan beberapa faktor yaitu bisa saja karena ATM dari milik KPM tertukar dengan milik KPM lain, dan juga karena tidak sesuai data KPM dengan data yang ada di Bank.
- 2) Untuk upaya yang kedua dalam mengatasi hal tersebut adalah berupaya memberikan pemahaman dan sosialisasi terhadap masyarakat KPM agar jauh lebih mengerti terkait mekanisme PKH yang saat ini berlaku.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Antapani Kulon memberikan sejumlah dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) seperti. Peningkatan kesehatan dan pendidikan, serta perbaikan kesejahteraan sosial, dan juga membantu mengurangi beban pengeluaran dan pendapatan, serta perubahan perilaku dan kemandirian KPM sendiri.

Dampak positif dari Program Keluarga Harapan (PKH) dirasakan langsung oleh para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Antapani Kulon. Salah satu penerima, beliau menyampaikan bahwa keberadaan program ini sangat membantu keluarganya dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ia menjelaskan bahwa penghasilan suami yang terbatas tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok rumah tangga, terutama di tengah meningkatnya harga kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak. Melalui bantuan dari PKH, beban ekonomi keluarga menjadi lebih ringan. Hal serupa juga dirasakan oleh salah satu Keluarga Penerima Manfaat, yang mengaku sangat terbantu dengan adanya program ini. Dalam wawancara, beliau menyampaikan bahwa saat ini tidak memiliki penghasilan tetap karena suami tidak lagi bekerja, dan ia hanya mengandalkan pemberian dari anak pertamanya yang jumlahnya pun terbatas. Situasi ini menunjukkan bahwa PKH tidak hanya berperan sebagai bantuan finansial, tetapi juga menjadi bentuk jaminan sosial yang sangat berarti bagi masyarakat rentan, terutama bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi yang signifikan.

Dampak positif dari Program Keluarga Harapan (PKH) tidak hanya dirasakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), tetapi juga oleh para pendamping dan aparat pemerintah kelurahan yang terlibat langsung dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara Bersama pendamping PKH di Kelurahan Antapani Kulon, beliau menyampaikan bahwa meskipun program ini belum mampu secara signifikan meningkatkan kesejahteraan sosial KPM secara langsung, kehadiran PKH sangat membantu dalam meringankan beban pengeluaran, khususnya untuk kebutuhan pendidikan anak. Menurutnya, PKH lebih tepat dipahami sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi tekanan ekonomi keluarga miskin, bukan sebagai solusi yang sepenuhnya menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan dari Ibu Lurah Antapani Kulon, yang mengakui bahwa bantuan PKH memberikan dampak positif tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi pemerintah kelurahan dalam menjalankan tugas mengatasi persoalan kesejahteraan sosial. Ia menambahkan bahwa bantuan seperti PKH sangat membantu pihak kelurahan dalam menangani kompleksitas masalah kemiskinan di wilayahnya, karena program ini menjadi salah satu bentuk intervensi konkret pemerintah yang sejalan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan temuan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa meskipun belum mengubah kondisi ekonomi secara drastis, PKH tetap memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperbaiki kualitas hidup dan meringankan beban ekonomi masyarakat miskin.

## E. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Kelurahan Antapani Kulon Kecamatan Antapani Kota Bandung, mengacu kepada teori yang digunakan Menurut Charles O. Jones (Siti Erna Latifi Suryana, 2009: 28) ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu, Pengorganisasian, Interpretasi pelaksana, Penerapan. dalam mekanisme pelaksanaan terkait Program Keluarga Harapan di Antapani Kulon sendiri sudah berjalan sesuai dengan mekanisme yang sudah dibuat hal ini dapat kita lihat dari pembahasan di atas. Adapun faktor keberhasilan dalam pelaksanaan mekanisme tersebut adanya keterkaitan antara pihak yang terkait serta interpretasi pelaksana yang cukup baik sehingga menghasilkan komunikasi dan kordinasi antar pihak berjalan dengan baik, hal tersebut bisa juga dilihat dari respon baik Masyarakat terhadap mekanisme pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Antapani Kulon. Adapun faktor kendala dalam proses pelaksanaan PKH di Kelurahan Antapani Kulon sendiri yaitu terkait masalah diluar teknis seperti saldo yang secara tiba-tiba 0 padahal dari data bayar pusat saldo sudah masuk kedalam rekening KPM. dan juga kurangnya pemahaman yang lebih terkait mekanisme pelaksanaan PKH terhadap Masyarakat sehingga menimbulkan beberapa masalah seperti tidak terima nya KPM yang terkena Graduasi. Untuk upaya dalam mengatasi kendala dalam proses pelaksanaan PKH di Kelurahan Antapani Kulon sendiri para pelaksana telah melakukan berbagai cara diantaranya, berkordinasi langsung dengan pihak Bank bersama KPM karena hal tersebut mungkin saja terjadi dengan beberapa faktor yaitu bisa saja karena ATM milik KPM tersebut tertukar dengan KPM yang lain, dan juga karena tidak sesuainya data KPM dengan data yang ada di Bank, selain itu pendamping juga terus memberikan pemahaman dan sosialisasi terhadap Masyarakat KPM agar lebih mengerti terkait mekanisme PKH yang saat ini berlaku. Dampak dari adanya Program Keluarga Harapan di Antapani Kulon ini sangat terasa oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hal tersebut dapat kita lihat dari hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti dengan KPM, seperti terbantu nya dalam pembiayaan untuk anak sekolah serta tercukupi nya kebutuhan sehari-hari dari bantuan sosial yang di terima, selain itu dampak dari adanya program ini juga sangat terasa oleh kelurahan dalam membantu mengatasi masalah kemiskinan.

## REFERENSI

- Andi, P. 2010. *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Anis Gita Sari, D. A. 2015. Evaluasi Program Keluarga Harapan Dalam Rangka Mengatasi Permasalahan Pendidikan dan Kesehatan di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. 1-13.
- Arif, R. 2009. *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta, Indonesia: Laksbang Mediatama.
- Badan Pusat Statistik. 2023, Juli 17. *Profil Kemiskinan di Indonesia* . Diambil kembali dari bps.go.id: <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>
- Badan Pusat Statistik Kota Bandung. 2023, Februari 17. *Profil Kemiskinan di Kota Bandung*. Diambil kembali dari bandungkota.bps.go.id: <https://bandungkota.bps.go.id/pressrelease/2023/02/17/1075/profil-kemiskinan-di-kota-bandung-maret-2022.html>
- Budi, W. 2012. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Indonesia: CAPS.
- Bungin, B. 2007. *penelitian kualitatif komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial* (ke3). Jakarta: PT. fajar Putra Grafika.

- Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. 2019. *Pedoman Program Keluarga Harapan (PKH)*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. 2015. Kajian Program Keluarga Harapan. *Kementerian Keuangan*, 1-23.
- HS, I. K. 2021. Model Collaborative Dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Garut. *Jurnal DIALEKTIKA*, 69-81.
- husna, N. 2014, Januari-Juni 29. Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan. *Jurnal Al-Bayan / VOL. 20(29)*, 45-58. Diambil kembali dari file:///C:/Users/DELL/Downloads/114-170-1-SM.pdf
- Islamy, M. I. 2013. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta, Indonesia: Bina Aksara.
- Kadarisman, M. 2018. Analisis Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara Di Pemerintah Kota Depok. *Jurnal BKN. Vol. 12 No. 2.*, 115-138.
- Kelurahan Antapani Kulon. 2023. Profil dan Tipologi Kelurahan Antapani Kulon Kecamatan Antapani. Bandung, Jawa Barat, Indonesia.
- Midgley, J. 1995. *Social Development, The Developmental Perspektive In Social*. London: SAGE Publications.
- Miles, B. M. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moleong, L. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Revisi ed.). Bandung, Jawa Barat, Indonesia: PT Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, H. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung, Jawa Barat, Indonesia: Alfa Beta.
- Payne, M. 2005. *Modern Social Work Theory (Third ed.)*. New York: Palgrave Macmillan.
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial: bpk.go.id.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga: bpk.go.id.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta: bpk.go.id.
- Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2019 Pedoman Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Warga Miskin Penerima Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai: bpk.go.id.
- Rahayu, S. N. 2013. Program Keluarga Harapan (PKH): Program Bantuan Dana Tunai Bersyarat di Indonesia. *International Policy Centre-IG*, 1-6.
- Rambe, A. 2004. Alokasi Pengeluaran Rumah Tangga dan Tingkat Kesejahteraan (Kasus di Kecamatan Medan, Kota Sumatra Utara). *Tesis. Sekolah Pascasarjana IPB Bogor*.
- Salsabil, H. A. 2019. Analisis Efektivitas Dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Parit Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir. *Skripsi*, 01-113.
- Setiawan, H. H. 2017. Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial. 273-286.
- Siti Erna Latifi, S. 2009. Implementasi Kebijakan Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang. *Thesis Magister Studi Pembangunan, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara*. Diambil kembali dari <http://respository.usu.ac.id/>
- Solichin, A. W. 2008. *Analisis Kebijakanaksanaan dari formulasi ke Implementasi Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta, Indonesia: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, Jawa Barat, Indonesia: PT Alfabet.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung, Jawa Barat, Indonesia: PT Alfabet.

- 
- Suparlan, P. 1984. *Kebudayaan Kemiskinan, dalam Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia – Sinar Harapan.
- Syafiie, I. K. 2008. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta, Indonesia: PT Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional : bpk.go.id.
- Vannisa Lilia Vidyastuti, M. H. 2022, Agustus. Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Margasuka Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 426 - 431.
- Wasito., S. W. 1980. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*. Bandung, Jawa Barat, Indonesia: Hasta.
- Winarno, B. 2002. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.